

Judul : Komisi VI: Riset Tetap Harus Independen
Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Komisi VII: Riset Tetap Harus Independen

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jangan sampai mengintervensi penelitian dari lembaga yang kini telah dilebur. Pemerintah tetap menjaga independensi penelitian.

"Kita harus kembali lagi kepada hakikat daripada lembaga riset bahwa lembaga riset itu harus memiliki independensi, memiliki keleluasaan dalam melakukan riset-riset itu," ujar Eddy di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/1).

Eddy mengatakan, BRIN jangan sampai menjadi lembaga yang hanya berfokus pada birokrasi

dan menyebabkan riset justru terhambat. Ia tak ingin riset malah menjadi sesuatu hal yang dipolitikasi dan komersialisasi.

"Sehingga, fungsi riset ini bisa dijalankan, jadi memang butuh kekhurusan, perlu pemahaman terkait riset ini ke depannya. Jadi kita berharap peleburan ini tidak akan menghambat, apalagi membuat riset itu menjadi tersendat-sendat," ujar Eddy.

Ia menjelaskan, peleburan lembaga riset ke BRIN tertuang dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Namun, proses peleburan ke BRIN itu harus menjaga dua hal.

Pertama, peleburan jangan sampai menyebabkan sumber

daya manusia dan ilmuwan di Indonesia tidak bisa diberdayakan ke depannya. Jika mereka tak berdaya, keberlangsungan riset dalam negeri justru akan dipertanyakan.

"Kedua, jangan sampai lembaga ini bukan menjadi lembaga yang berbasis atau fokus pada riset, tetapi fokus pada birokrasi dan administrasi. Itu yang penting," ujar sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Komisi VII seharusnya menggelar rapat dengar pendapat dengan BRIN untuk meminta penjelasan terkait peleburan lembaga riset. Namun, rapat tersebut ditunda dan dilanjutkan pada 17 Januari 2022 dengan mengundang Lembaga Biologi dan Molekuler (LBM) Eijkman.

"Komisi VII DPR tentu ingin mendapatkan penjelasan yang detail dan komprehensif mengenai proses integrasi tersebut.

BRIN jangan sampai menjadi lembaga yang hanya berfokus pada birokrasi dan menyebabkan riset justru terhambat.

Upaya tata kelola dan mekanisme penggabungan lembaga-lembaga tersebut ke dalam BRIN tanpa menciptakan permasalahan baru dari proses peleburan yang berjalan," ujar dia.

Ia menjelaskan, Komisi VII perlu mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan berimbang dari BRIN dan LBM Eijkman menyangkut nasib para peneliti, periset, dan karyawan yang tak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). "Kita menghendaki agar jangan sampai proses peleburan ini meninggalkan sumber daya manusia unggul yang selama ini sudah kita investasikan pendidikannya, perjalanan kariernya, termasuk riset-riset utamanya tertinggal," ujar Eddy.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menanggapi pendapat yang menyebut peleburan lembaga riset ke badan di pemerintahan akan menghilangkan independensi penelitian. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar. "Ya kalau saya tidak melihat seperti itu, karena perisetkan independen," ujar Handoko.

Misalnya, ia menjelaskan, Lembaga Biologi dan Molekuler (LBM) Eijkman yang sedari awal memang berada di bawah BRIN, tetapi penelitiannya masih berlanjut, salah satunya adalah vaksin Merah Putih. "Eijkman selama ini di bawah BRIN juga, jadi kan tidak ada perubahan sebenarnya. Mereka selama ini juga di bawah BRIN," ujar Handoko. ■ *ed: ratna puspita*